

**CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOLOK**

TUJUAN

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR

1. Indeks Pelayanan Publik
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

SASARAN 1

Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Hidupan Bermasyarakat

INDIKATOR

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Linmas

STRATEGI

Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

PROGRAM

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR

1. Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
3. Persentase cakupan perlindungan masyarakat
4. Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya

KEGIATAN

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

INDIKATOR

1. Persentase penertiban pelanggaran trantibum
2. Persentase pelanggaran Perda dan Perbup yang tertangani
3. Persentase pembinaan personil Satpol PP yang berkualitas PPNS

Crosscutting dengan, DISHUB, Dinas PUPR, BKD, SETDA, SET DPRD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata

SASARAN 2

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar

INDIKATOR

Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar

STRATEGI

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan pada Satpol PP dan Damkar

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan

KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR

1. Persentase Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan
3. Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana
5. Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran
6. Persentase terpenuhinyasarana dan prasarana kantor
7. Persentase tersedianya jasa kebutuhan urusan administrasi kantor
8. Persentase pemeliharaan barang milik daerah

Crosscutting dengan, BKD, BKPSDM, BAPELITBANG, INSPEKTORAT, SETDA, DLH

KEGIATAN

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

INDIKATOR

1. Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran
2. Persentase Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang memiliki sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran serta memenuhi kelayakan standar sarpras proteksi kebakaran
3. Persentase penyebab terjadinya kebakaran
4. Persentase Nagari yang mengikuti sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran
5. Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kondisi membahayakan manusia

Crosscutting dengan, BPBD

